

**Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(Studi di Daerah Terpencil Kepulauan
Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

YUNA MINANTI

NIM. 120563201148

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan kepada masyarakat yang kurang mampu tidak ada pengawasan langsung dari pihak Dinas Sosial, kurangnya ketelitian pengawasan dalam penetapan calon penerima bantuan. Dimana masih ada masyarakat yang memiliki perekonomian yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Proses penyaluran dana bantuan yang sering terlambat. Masyarakat penerima bantuan belum dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, informan penelitian berjumlah 15 orang dengan 1 orang sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan (pedoman wawancara), observasi, dokumentasi selanjutnya analisis data yang dilakukan dengan secara kualitatif.

Hasil penelitian Program Keluarga Harapan di Desa Hilir berdasarkan 6 dimensi. Efektifitas dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan lama, tetapi belum ada perubahan yang dirasakan masyarakat. Efisiensi pelaksanaan PKH belum tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki perekonomian yang layak. Kecukupan pada PKH sering terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan. Perataan pelaksanaan PKH belum merata diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Responsivitas pada PKH belum maksimal, kebanyakan hasil yang dicapai pada masyarakat penerima bantuan bukan hasil dari PKH melainkan penerima bantuan pindah tempat tinggal. Kelayakan pelaksanaan PKH sudah tepat diberikan untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan.

Kesimpulan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan terdapat ketidaksesuaian dari 6 dimensi. Dari beberapa indikator menunjukkan bahwa tidak ada pengawasan langsung terhadap penerima bantuan. Pelaksanaan program yang dilakukan masih belum berjalan secara maksimal, didalam penetapan calon penerima bantuan masih banyak terjadi kesalahan, tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, dan juga tidak menyeluruhnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum tercapainya peningkatan taraf hidup penerima bantuan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan.

Saran perlu adanya upaya bagi Dinas Sosial untuk melakukan pengecekan kelayakan daftar sasaran dengan mengkaji lebih teliti kebenaran antara data dan kenyataannya dilapangan, dan memberikan penjelasan atau surat edaran kepada masyarakat penerima bantuan mengenai keterlambatan penyaluran dana bantuan agar tidak terjadinya kesalahan dalam jalannya Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

Kata Kunci : Kebijakan, Evaluasi, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

The program implementation of the “Keluarga Harapan” Program given by Social Departemen of Bintan Regency to Underprivileged Society there was not direct supervision from Social Department, because lack of supervision in Determination of beneficiaries candidat. There Society that have low income that worthy accept the assist. Distribution process of Donation is always late.

The purpose of this research is to Evaluate the implementation of the “Keluarga Harapan” Program in Hilir District, Sub of Tambelan, Bintan Regency. Kind of research is used descriptive with using qualitative, approach, the research resource person 15 person with 1 person as a resource key. The Technic of Data collection is used interview, observation, documentation, next data analysis that is done in a qualitative.

“Keluarga Harapan” Program research results in the village of Lower based on 6 dimensions. Effectiveness in the implementation of the PKH is longstanding, but there is no perceived change in society. Efficiency of the implementation of PKH not right on target given to the poor there are still some people who have a viable economy. PKH adequacy frequent late in disbursement. Leveling PKH uneven implementation is given to the poor. Responsibility of the PKH is not maximized, most of the results achieved on the beneficiaries are not the result of PKH beneficiaries but resettled. Accuracy of implementation PKH own right given to the poor who need help.

Conclusion of this research show in implementation process in “Keluarga Harapan” Program there are mismatch from 6 dimensions. From some indicator show that there wasn't direct supervision against the Recipient of the aid. Implementation of this program still not work. Determination of the receiver candidat still have wrong, not appropriate with criteria that has specified and also not through give to society that really need help. An increase in the standard of living hasn't been reached in Hilir District, sub of Tambelan.

Suggestions there are needs the efforts of Social Departemen to check feasibility of list target with more review the truth between data and in fact and give the Description or letter to society of recipient of the aid about the wrong implementation of fund in “Keluarga Harapan” Program in Hilir District, sub of Tambelan, Bintan regency.

Keywords: Policy, Evaluation, “Keluarga Harapan” Program

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang masih dilanda masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat penting karena berpengaruh buruk terhadap banyak aspek kehidupan dan menimbulkan banyak masalah sosial seperti kriminalitas, putus sekolah, kelaparan, hingga kematian. Masalah-masalah tersebut terjadi karena kebutuhan pokok yang sehari-hari semakin meningkat, hal ini harus mendapat tanggapan dan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu bagaimana cara pemerintah meminimalisasi kemiskinan dan memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan salah satu tujuannya

adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu penghambat terwujudnya kesejahteraan umum adalah kemiskinan. Maka setiap tahunnya pemerintah meningkatkan jumlah program-program dan usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/ KSM).

PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan salah satu “*cash program*” untuk mengatasi dampak akibat kebijakan kenaikan harga BBM. PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan

yang dirancang untuk membantu RTSM/ KSM pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut. Keberhasilan PKH untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan. Kriteria peserta PKH adalah KSM yang memenuhi satu atau beberapa

kriteria yaitu memiliki :

1. Ibu hamil/nifas
2. Anak berusia di bawah 6 tahun,
3. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
4. Anak penyandang disabilitas 0-21 tahun.

Secara khusus, tujuan PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kabupaten Bintan sebagai daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang mulai diberlakukan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, terdapat 7 desa yang menjadi target pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Salah satu desa yang menjadi target

pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu Desa Hilir Kecamatan Tambelan. Jika dilihat dari geografis, Kecamatan Tambelan adalah suatu pulau kecil yang terletak di Laut China Selatan, 185 mill (300 km) dari Pulau Bintan. Waktu yang ditempuh untuk sampai di Tambelan sekitar 24 jam. Jumlah penduduk di Kecamatan Tambelan berjumlah 5.524 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 1.563, sebanyak 80% masyarakatnya berprofesi sebagai Nelayan, sisanya Pegawai Negeri Sipil dan Petani. Desa Hilir terbagi dalam 7 RT mempunyai jumlah penduduk yang tercatat sampai saat ini sekitar 1608 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebesar 446 KK. Terdapat 78 Rumah Tangga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan

Tambelan. (Sumber : Kantor Camat Tambelan, 2016).

Awalnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilakukan oleh Bidang Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Namun jarak tempuh ke Kecamatan Tambelan yang cukup jauh dan sulit menyebabkan pemerintah mengalami kendala dan kesulitan dalam melaksanakan suatu program secara optimal dengan kata lain Kecamatan Tambelan merupakan salah satu Kecamatan yang terabaikan di bandingkan Kecamatan lainnya di Kabupaten Bintan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara optimal dalam penanganan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya khusus di Kecamatan Tambelan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir kecamatan Tambelan hingga saat ini belum berjalan secara maksimal. Terlihat selama 6 tahun berjalannya Program Keluarga Harapan belum terdapat perubahan dari segi apapun. Bahkan yang mendapatkan bantuan Program tersebut tetap orang yang sama dari tahun ke tahun, tidak ada tambahan orang baru. ★ Seharusnya setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan para penerima bantuan bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan tidak bergantung pada bantuan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten dirasa belum tepat sasaran diberikan kepada masyarakat Desa Hilir Kecamatan Tambelan yang kurang mampu. Dalam

penelitian yang peneliti lakukan terdapat 78 beberapa penerima bantuan yang memiliki perekonomian yang layak. Perlu dilakukannya revalidasi dari pendamping dan pihak Dinas Sosial agar bantuan tepat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program Keluarga Harapan di keluarkan pada 4 tahap yaitu :tahap pertama pada bulan Maret, tahap kedua pada bulan Juni, tahap ketiga pada bulan September, dan tahap ke tiga bulan Desember. Namun pada kenyataannya di lapangan waktu realisasi penyaluran dana bantuan tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya, sering terjadi keterlambatan pada waktu penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan ini. Penyaluran dana bantuan yang seharusnya keluar pada bulan Maret jadi bulan April,

bulan Juni keluarnya pada bulan Agustus, dan pada bulan September menjadi Desember. Pendamping PKH dalam melakukan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada penerima bantuan seperti terlalu lamanya jadwal pengawasan yaitu tiga bulan sekali. Dirasa kurang maksimal untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Studi di Daerah Terpencil Kepulauan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan)”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi daerah atau lokasi penelitian adalah Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan

C. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:274) dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) komponen yaitu sebagai berikut:

- i. Reduksi Data (*Data Reduction*)
- ii. Penyajian Data (*Data Display*)
- iii. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

D. Landasan Teori

1. Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata “*policy*” sedangkan keputusan berasal dari kata “*decision*”. Dalam arti luas Dye

(1975: 1) dalam Yudiantmaja (2013:30) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pendapat Dye tersebut mengidentifikasi bahwa kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah dan berkenaan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dikerjakan oleh pemerintah dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antar warga dengan pemerintah.

Menurut Nugroho (2012:170), mendefinisikan kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita

bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Evaluasi

Evaluasi yaitu proses atau rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan pada hasil-hasil kegiatan atau program kerja yang telah dicapai dengan target yang direncanakan. Dengan evaluasi dapat dilihat sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan dalam pembuatan kebijakan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat

yang kurang mampu. Suatu kebijakan yang sudah dijalankan perlu dievaluasi agar dapat melihat sejauh mana efektivitas dari program tersebut dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tujuan. Kegiatan evaluasi dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervise, control dan pemantauan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan

yang dikembangkan dan dilaksanakan.

3. Program Keluarga Harapan

Menurut Buku Pedoman Umum Keluarga Harapan dari Dinas Sosial, Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi

kemiskinan, terutama masalah kemiskinan kronis.

PKH adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

E. Hasil Penelitian

Program Keluarga Harapan merupakan program dari kebijakan pemerintah, dimana pemerintah sebagai (*public servant*) dituntut untuk melayani masyarakat secara optimal yaitu memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat. Evaluasi

pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Suatu program mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan dari sebuah kebijakan. Maka dengan demikian terdapat enam indikator yaitu : efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, kelayakan.

1. Efektifitas

Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial

sejauh ini belum ada perubahan setelah beberapa tahun berjalan dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tetap orang yang sama nyatanya masih ada beberapa masyarakat yang masuk kriteria mendapatkan bantuan tersebut belum merasakan bantuan tersebut sama sekali. Disini juga terlihat tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan, sehingga terlihat jelas program ini dirasakan masih kurang maksimal.

Seharusnya dengan adanya Program Keluarga Harapan yang telah berjalan sejak lama ini ada perubahan yang dirasakan oleh

masyarakat itu sendiri dengan melihat tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan PKH pengawasan sangat perlu dilakukan karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terlihat jelas keseriusan dalam melaksanakan program tersebut. Dengan adanya pengawasan Program Keluarga Harapan tersebut lebih berjalan dengan efektif dan maksimal. Sehingga apa yang menjadi tujuan program tersebut dapat dicapai.

2. Efisiensi

Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan

dalam penetapan Rumah Tangga penerima bantuan Program Keluarga Harapan belum tepat sasaran diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Beberapa masyarakat yang memiliki perekonomian yang baik dan mencukupi menerima bantuan tersebut. Ada juga beberapa masyarakat yang beranggapan sebaliknya. Tetapi sebagian masyarakat yang mendapat bantuan beranggapan yang menerima bantuan PKH belum tepat sasaran dimana yang mendapatkan bantuan perekonomian menengah. Sementara masih ada masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik, tetapi tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Faktanya Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan kepada masyarakat di Desa Hilir Kecamatan Tambelan belum tepat sasaran, masih ada beberapa masyarakat yang memiliki perekonomian layak menerima bantuan tersebut. Disisi lain masih banyak masyarakat yang perekonomian rendah belum tersentuh sama sekali Program Keluarga Harapan ini. Disini terlihat jelas peran dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat perekonomian rendah. Maka dari itu Program Keluarga Harapan dinilai belum efisien.

Seharusnya dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh

Dinas Sosial kepada Keluarga Sangat Miskin yang memiliki perekonomian rendah dapat membantu perekonomian masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf hidupnya, dengan tidak terbebani lagi oleh kebutuhan lain. Masyarakat yang menerima terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan peran Dinas Sosial sangat perlu karena Dinas Sosial juga harus memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Sehingga semua masyarakat yang membutuhkan mendapat bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Kecukupan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan penyaluran dana bantuan sering terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan tersebut. Masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui penyebab keterlambatan dana tersebut.

Faktanya Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh Dinas Sosial terdapat kendala yaitu penyaluran dana bantuan, yang setiap tahapnya terjadi keterlambatan. Dimana tidak ada penjelasan dari pihak Dinas Sosial atau Pendamping PKH. Maka dalam hal ini timbul beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai keterlambatan atau penundaan

dana bantuan Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial.

Seharusnya pihak Dinas Sosial atau pendamping memberikan penjelasan kepada masyarakat penerima bantuan perihal keterlambatan atau penundaan dan bantuan Program Keluarga Harapan. Sehingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat penerima bantuan tersebut.

4. Perataan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan belum sesuai atau belum merata diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Masih terdapat beberapa masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan ini.

Faktanya bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat miskin pada kenyataannya belum semua masyarakat perekonomian rendah belum merasakan bantuan PKH ini. Dimana terdapat masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan ini belum bisa merasakan program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

Seharusnya pemberian bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada semua masyarakat miskin atau yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bintan atau Pendamping meninjau kembali masyarakat penerima bantuan tersebut untuk memastikan

semua masyarakat telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan tanpa terkecuali.

5. Responsivitas

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan belum maksimal, karena kebanyakan hasil yang dicapai pada masyarakat penerima bantuan bukan dari hasil Program Keluarga Harapan ini melainkan karena penerima bantuan Program Keluarga Harapan pindah tempat tinggal atau masyarakat penerima bantuan tidak memiliki tanggungan lagi seperti sudah tamat sekolah atau sudah bekerja.

Faktanya bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada

masyarakat miskin pada saat ini Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya tercapai. Jika dilihat dari taraf hidup masyarakat di Desa Hilir

Kecamatan Tambelan belum sama sekali memperlihatkan grafik kenaikan taraf hidup, yang mana Program ini sudah bertahun-tahun berjalan. Tetapi belum menunjukkan hasil yang di capai.

Seharusnya bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Hilir Kecamatan Tambelan. Sehingga

dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini masyarakat dapat terbantu dan merasakan kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Kelayakan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan sudah tepat di berikan untuk masyarakat miskin di Desa Hilir karena di Desa Hilir ini banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut.

Faktanya Program Keluarga Harapan diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sudah tepat untuk di berikan kepada masyarakat Desa Hilir, karena masyarakat di Desa Hilir rata-rata berpenghasilan rendah. Hanya saja perlu di lakukan pengawasan dan evaluasi agar Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan baik.

Seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan

pendamping selalu berkoordinasi dengan masyarakat dalam menjalankan Program Keluarga Harapan. Sehingga dapat memberikan bahan evaluasi dalam penerapan Program Keluarga Harapan ini.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan diberikan kepada masyarakat yang kurang

mampu dan memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi pada kenyataannya dilapangan setelah beberapa tahun Program Keluarga Harapan ini berjalan dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan tetap orang yang sama dan masih ada beberapa masyarakat yang masuk kriteria mendapatkan bantuan tersebut belum merasakan bantuan Program Keluarga Harapan ini. Disini juga terlihat tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kecamatan Tambelan, sehingga terlihat

jelas program ini dirasakan masih kurang maksimal.

b. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Kesimpulannya dalam pemberian bantuan Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya tepat sasaran diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini terlihat ada masyarakat yang memiliki perekonomian yang layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Kurangnya ketelitian pengawasan dalam penetapan calon penerima bantuan, yang menyebabkan masyarakat yang mampu mendapatkan

- bantuan tersebut. Peran dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat perekonomian rendah. Sehingga Program Keluarga Harapan dinilai belum efisien.
- c. Kecukupan seperti penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan sering terjadi keterlambatan pencairan dana tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada setiap tahapnya.
- d. Perataan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilihat belum sesuai atau belum merata diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Dimana terdapat masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan ini belum merasakan program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- e. Responsivitas yang diketahui berdasarkan hasil tanggapan informan bahwa pelaksanaan Program Keluarga di Desa Hilir belum maksimal. Hal ini dapat dilihat hasil yang dicapai pada masyarakat penerima bantuan belum dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tetapi masyarakat penerima bantuan pindah tempat tinggal atau masyarakat penerima bantuan tidak memiliki tanggungan lagi seperti sudah tamat sekolah.
- f. Kelayakan pada pemberian bantuan Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan bagi

masyarakat yang kurang mampu di Desa Hilir. Rata-rata masyarakat di Desa Hilir berpenghasilan rendah.

2. Saran

- a. Bagi Dinas Sosial dan pendamping yang terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, agar melakukan pengecekan kelayakan daftar sasaran dengan mengkaji kebenaran antara data dan kenyataannya dilapangan.
- b. Bagi Dinas terkait dalam pemberian bantuan Program Keluarga Harapan harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
- c. Seharusnya apabila terjadi hal keterlambatan pencairan dana

pihak Dinas Sosial Kabupaten Bintan atau pendamping memberikan penjelasan atau surat edaran kepada masyarakat penerima bantuan. Sehingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

- d. Bagi dinas terkait sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek tertentu (kesehatan dan pendidikan) dalam penetapan pemberian bantuan agar kesejahteraan kehidupan masyarakat penerima bantuan terpenuhi.
- e. Dengan melakukan evaluasi terencana dan berkelanjutan serta dengan membuat kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pihak

Dinas Sosial atau pendamping sehingga diharapkan kedepannya Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan baik dan lebih berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

f. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan membuat kebijakan program-program lain yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Hilir. Adapun program lain yang diberikan selain untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

-----, 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy (Pengantar Teori dan Kebijakan Praktis Analisis Kebijakan)*. Jakarta : Kencana

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Refika Aditama

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

_____. 2006. *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia*

Wibawa, Samodradkk. 1994, *Evaluasi Kebijakan*

G. Daftar Pustaka

1. BUKU :

Islamy, 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*.

Publik, Jakarta: PT.
Raja
GrafindoPersada.

Satria, Permana Edwin. 2012.

Evaluasi Pelaksanaan

Widodo, Joko. 2012.
*Analisis Kebijakan
Publik
(Konsep dan Aplikasi
Analisis Proses
Kebijakan Publik)*.
Malang :
Bayumedia
Publishing

Program Keluarga Harapan

(PKH) di Kelurahan Saruni

Kecamatan Majasari

Pandeglang Tahun 2010

Universitas Sultan

Winarno, Budi. 2007.
*Kebijakan Publik Teori
& Proses*.
Yogyakarta :
Media Pressindo.

Agung Tirtayasa : Banten

2. DOKUMEN :

Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial,
Kementerian Sosial.
2013.
*Pedoman Operasional
Kelembagaan
PKH Tahun 2013*.
Jakarta. Indonesia

Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial,
Kementerian Sosial.
2015.
*Pedoman Umum
Program
Keluarga Harapan*.
Jakarta. Indonesia

3. JURNAL :